

# Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Raja Muhammad Azhari<sup>1</sup>, Dede Sri Kartini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

e-mail: raja19001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, dede.sri.kartini@unpad.ac.id<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini melatar belakangi mengenai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengembangan pariwisata pada pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. Rumusan masalahnya ialah: Bagaimana Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengembangkan pariwisata pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2021? Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian dengan memakai studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan pengumpulan data, reduksi data, serta klasifikasi data. Teori yang digunakan ialah strategi pemerintahan menurut Mulgan, yang dimana terdapat 5 dimensi, diantaranya *Purpose, Environments, Directions, Actions* dan *Learning*. Hasil penelitian ini ialah Strategi Pemerintah pada pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengembangkan pariwisata tahun 2021 telah dijalankan sesuai dinamika dan regulasi yang ada. Hambatan yang ada dan menjadi tantangan ialah terdapat dinamika baru pada tahun 2021 dimana pandemic covid-19 menjadi salah satu gangguan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berbagai upaya yang sudah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait ialah dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi pandemic covid-19 agar sektor pariwisata dapat berjalan sesuai kondisi yang ada.

**Kata kunci:** Strategi Pemerintahan, Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract

This research is based on efforts to increase local income by developing tourism in the Pangandaran Regency government in 2021. The formulation of the problem is: What is the strategy implemented by the Pangandaran Regency Government to increase local income by developing tourism in Pangandaran Regency in 2021? The method used in this study is qualitative. Data collection techniques in research using literature studies, field studies (observations and interviews). The data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, and data classification. The theory used is a government strategy according to Mulgan, which has 5 dimensions, including *Purpose, Environments, Directions, Actions* and *Learning*. The result of this study is that the Government's Strategy in the Kabupaten Pangandaran government to increase local income by developing tourism in 2021 has been carried out in accordance with existing dynamics and regulations. The existing and challenging obstacle is that there is a new dynamic in 2021 where the Covid-19 pandemic is one of the disturbances to increase indigenous regional income. Various efforts that have been carried out to solve related problems are by distributing assistance to the community,

socializing the Covid-19 pandemic so that the tourism sector can run according to existing conditions.

**Keywords :** *Governance Strategy, Tourism, Tourism Development, Local Government Revenue*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pariwisata baik wisata alam, histori, atau dengan budaya yang sudah ada. Hal itu dikarenakan bahwasanya letak geografis Indonesia berada pada wilayah tropis serta negara yang memiliki banyak pulau. Alhasil dari hal-hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai sorot perhatian dari publik baik itu dalam negeri atau luar negeri. Keberagaman budaya di Indonesia juga baik beragamnya adat istiadat, kearifan lokal, menjadi peninggalan sejarah-sejarah pada masa lampau menjadikan suatu hal yang khas yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pada pandemi Covid-19, dapat mengakibatkan resesi pada seluruh negara salah satunya di Indonesia itu sendiri. Terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2020 serta pertumbuhan yang negatif pada triwulan II dan III tahun 2020. Hal ini berdampak pada perekonomian tiap sector-sector informal dikarenakan sector-sector tersebut memiliki pendapatan rendah, serta tabungan yang rendah. Hal itu dapat berporos condong tidak mempunyai perlindungan asuransi atau tabungan serta status tenaga kontrak (Anggarini, 2021).

Sebagaimana apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, sector-sector yang terdampak pada pandemi Covid-19 dapat beragam. Aktivitas perekonomian dunia yang menurun serta mobilitas masyarakat yang terbatas yang berimbas kepada semua sector salah satunya ialah sector pariwisata. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada tahun 2020 tepatnya bulan Maret menyatakan bahwa pandemi Covid-19 akan dapat dirasakan pada rantai pariwisata. Kurang lebih dari 80 persen, usaha kecil dan menengah (UMKM) pada sector pariwisata dengan jutaan mata pencaharian pada seluruh dunia terdampak Covid-19 (Wahyuni, 2021).

Mewabahnya Covid-19 di Indonesia secara tidak disengaja berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sector pariwisata sudah berkontribusi terhadap penerimaan negara berdasarkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, investasi, serta penyerapan tenaga kerja. Seberjalannya tahun 2019, proses untuk mewujudkan devisa negara dari pariwisata mencapai Rp280 triliun dengan kontribusi pada PDB nasional dengan besaran 5,5 persen (Wahyuni, 2021). Menurut data Sakernas 2019, terdapat kurang lebih 11,83 persen pekerja Indonesia bekerja pada sector industri pariwisata (Anggarini, 2021).

Berbicara mengenai devisa negara, menurut Kementerian Pariwisata dalam Sutrisnawati, sector pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Pada tahun Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 5 fokus program pembangunan untuk 5 tahun ke depan yakni diantaranya infrastruktur, maritim, energi, pangan, serta pariwisata (IMEPP). Berdasarkan 5 sector tersebut, pariwisata menjadi *leading sector* atau sector unggulan (Sutrisnawati, Budiasih, & Ardiasa, 2020).

**Tabel 1. program pembangunan untuk 5 tahun**

Indikator	2015		2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kontribusi PDB	4,23%	4,25%	4,50%	4,13%	5%	5%	5,25%	5,25%
Devisa (Triliun Rp)	144	175,71	172	176,23	200	202,13	223	223
Jumlah Tenaga Kerja	11,4	10,36	11,8	12,28	12,0	12,60	12,6	12,7
Indeks Daya Saing (WEF)	#50	#50	n.s	n.s	#40	#42	n.a	n.a
Wisatawan Mancanegara	10	10,41	12	12,02	15	14,04	17	15,81
Wisatawan Nusantara	225	256,42	260	264,33	265	270,82	270	303,5

Sumber: eperformance.kemenpar.go.id

Dapat dianalisis berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2016-2018 sektor pariwisata memberikan devisa yang cukup tinggi dan melewati target. Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga berperan untuk PDB walaupun secara dinamis, akan tetapi hampir memenuhi target. Wisatawan dari mancanegara dan juga dari dalam negeri sendiri terus bertambah setiap tahunnya yang menjadikan pariwisata di Indonesia tetap eksis dan juga berperan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Sektor pariwisata ialah sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pengembangan serta pendayagunaan sumber daya serta potensi pariwisata daerah diupayakan juga menjadi harapan yang dapat menghasilkan sumbangan untuk pembangunan ekonomi. Datangnya wisatawan kepada salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) memberikan kesejahteraan serta kemakmuran untuk penduduk yang daerahnya dikunjungi. Sama seperti sektor yang lain, pariwisata juga memiliki pengaruh kepada perekonomian pada salah satu daerah atau negara tujuan wisata. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting guna mendukung pengembangan destinasi wisata baru. Ada 5 faktor yang diharuskan untuk terpenuhi guna mengembangkan salah satu daerah untuk menjadi tujuan wisata, yakni objek, fasilitas, infrastruktur, transportasi, dan perhotelan (Pebriana, Mulyawan, & Sutrisno, 2021)

Pada penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan penelitian mengenai Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hal ini peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran guna meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pengembangan pariwisata pada tahun 2021. Adapun problematika yang menarik

bagi peneliti ialah pada situasi *covid-19* ini terdapat dinamika dan juga tentu strategi dan pendekatan yang dilakukan akan berbeda dari biasanya.

## METODE

Pada penelitian Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran, pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode postpositivistik dikarenakan berlandaskan kepada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, dikarenakan proses penelitian lebih bersifat artistik (kurang terpol), serta disebut sebagai metode yang interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Metode yang digunakan juga ialah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Whitney merupakan upaya untuk mencari fakta melalui pendapat yang tepat. Penelitian deskriptif menelaah mengenai berbagai problematika pada masyarakat, dan berbagai cara yang dapat diakui pada masyarakat serta pada situasi dan kondisi tertentu. Hal yang dimaksud dapat berupa mengenai relasi, berbagai aktivitas, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan pberbagai proses yang sedang berjalan serta berbagai pengaruh dari salah satu fenomena (Nazir, 2005).

Pada metode penelitian kualitatif, menggunakan beberapa cara untuk melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut diantaranya ialah observasi lapangan, hasil wawancara, dan studi Pustaka pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Observasi dilakukan dengan melihat dari kondisi kantor, fasilitas, lingkungan pariwisata, dan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Wawancara dilakukan terhadap beberapa aktor diantaranya dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, masyarakat Kabupaten Pangandaran, pengusaha pada bidang pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Studi pustaka dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Pemerintahan

Pada sektor pemerintahan, strategi mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan pemikirannya serta implementasi pelaksanaannya guna mencapai keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan. Hal itu tentu dilakukan secara strategis serta arah yang jelas guna mencapai tujuan dari pemerintah itu sendiri. Dalam Fajrianti, dikemukakan teori dari Geoff Mulgan mengenai strategi pemerintahan diantaranya sebagai berikut (Fajrianti, Dedi, & Yuliani, 2022):

1. *Purpose* (Tujuan)  
*why they should act in the first place: defining the compelling purposes which arise from the gaps between public needs, aspirations and fears and current realities.*
2. *Environments* (Lingkungan)  
*Why there are seeking to achive their goals, the contexts (present and future) for action and the capacities they have to get things done. It is from the interaction of these two that goverments and agencies then define their chosen.*
3. *Directions* (Arahan)  
*What they want to achieve: the goals and outcomes that are desirable and achievable (which in the military take the form of the „commander“s intent“ which is written at the top of any order), as well as their relative priorities and sequencing. These in turn define.*
4. *Actions* (Aksi)  
*How they are to achieve their goals, with detailed strategies, policies, laws and programmes, as well as inspirational leadership to persuade others to commit to the cause. Together these aim to create public value, but since all actions have unexpected*

*results, strategy also depends critically on.*

#### 5. Learning (Pembelajaran)

*Systems for understanding not just which actions did or didn't work but also whether there's a need to rethink 2369 purposes, analyses and chosen directions.*

Berdasarkan penjelasan teori di atas, peneliti merasa teori tersebut cocok digunakan untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan dari Strategi Pemerintah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dirasa cocok dikarenakan bahwa unsur-unsur dari teori tersebut apabila dikaji pada permasalahan dapat mewakili kondisi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari Kabupaten Pangandaran. Disisi lain juga, mengingat terjadi pandemi *covid-19*, akan menghasilkan berbagai strategi yang digunakan berbeda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **Dimensi Purpose (Tujuan)**

Pada indikator tujuan ini, terdapat definisi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan diantaranya ialah Tujuan atau Purpose menegaskan terhadap suatu dasar kenapa tindakan tersebut harus dilaksanakan pada tempat pertama. Pendapat tersebut menerjemahkan bahwa tujuan yang ada hadir dengan secara terpaksa melalui kesenjangan diantara kebutuhan, aspirasi serta realitas atau keadaan saat ini (Mulgan, 2009). Tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2022 berlandaskan kebutuhan masyarakat, berbagai aspirasi masyarakat dan peraturan dan regulasi yang berlaku seperti Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, Rencana Strategis SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, juga dari visi dan misi Kabupaten Pangandaran, dan lain-lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berikut penjelasan dari indikator-indikator tujuan diantaranya:

- a. Visi yang dituju pada tahun 2021-2026 di Kabupaten Paangandaran ialah "Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa". Pada visi tersebut terdapat juga misi yang ditunjukkan untuk dapat memenuhi visi yang sudah ada. Terdapat 6 misi diantaranya ialah:
  - 1) Mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan;
  - 2) Mengembangkan aksesibilitas pendidikan sampai perguruan tinggi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan;
  - 3) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal;
  - 4) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, taqwa, dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama;
  - 5) Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel;
  - 6) Menigkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran terdapat beberapa muatan yakni rencana, capaian, realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Terdapat beberapa indikator dari tujuan tersebut salah satunya yang menjadi perhatian ialah mengenai pengembangan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu capaian renadah berdasarkan laporan yakni dengan realisasi Rp. 16.755.027.000 dengan target Rp. 30.000.000.000 pada tahun 2021.
- c. Kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pangandaran baik itu dari pengusaha yang bergerak pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran atau masyarakat sipil di Kabupaten Pangandaran ialah menginginkan untuk terdapat bantuan-bantuan dan berbagai kebijakan dari pemerintah baik itu untuk menunjang



kehidupan dan juga pendukung untuk menjalankan usaha yang bergerak pada sektor pariwisata.

### **Dimensi Environments (Lingkungan)**

Pada indikator lingkungan ini dijelaskan bahwa lingkungan menegaskan terhadap hal dimana serta kemana dari tujuan tersebut yang harus dicari melalui konteks pada saat ini serta masa depan (Mulgan, 2009). Pada strategi lingkungan ini terdapat 5 destinasi pariwisata yang dilakukan pengembangannya di Kabupaten Pangandaran diantaranya Pantai Pangandaran, Pantai Karapyak, Pantai Batukaras, Pantai Batu Hiu, dan Cukang Taneuh/*Green Canyon*. Berikut penjelasan dari indikator ini ialah:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran melakukan pengembangan pariwisata terhadap 5 destinasi, diantaranya ialah pada lokasi Pantai Pangandaran, Pantai Karapyak, Pantai Batukaras, Pantai Batu Hiu, dan Cukang Taneuh/*Green Canyon*.
- b. Wisawatan sebagian besar hanya mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik wisata pantai dan bahari, padahal ada banyak daya tarik wisata lainya seperti desa wisata, wisata petualang, wisata gua dan lain sebagainya.

### **Dimensi Directions (Arahan)**

Pada indikator arahan dijelaskan bahwa arahan merupakan suatu tujuan serta hasil yang ingin dicapai dengan cara memberikan komando (Mulgan, 2009). Terdapat berbagai arahan atau komando yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan dari target pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 ialah Rp. 30.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 16.755.027.000. Pandemi covid-19 berdampak terhadap industri pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Maka dari itu, terdapat beberapa peraturan yang menjadi arahan dan diterapkan pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi covid-19 diantaranya:

1. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengetatan Wilayah
2. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2021 Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
3. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegapan Disiplin Protokol Kesehatan
4. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
5. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
6. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
7. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
8. Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pengetatan Wilayah
9. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Pandemi Covid-19
10. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Intruksi Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pandemi Covid-19
11. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3

12. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3
13. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3
14. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3
15. Instruksi Bupati Pangandaran Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3
16. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor : 443/2558/BPBD/2021 Tentang Uji Coba Pembukaan Destinasi Di Masa Pandemi Covid - 19 Tentang Uji Coba Pembukaan Destinasi Wisata
17. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor : 443/2564/BPBD/2021 Tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : 443/2558/BPBD/2021 Tentang Ujicoba Pembukaan Destinasi Wisata di Masa Pandemi Covid-19
18. Surat Edaran Bupati Pangandaran Nomor : 443/2932-BPBD/2021 Tentang Pedoman Penyerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 Di Kabupaten Pangandaran.

Adanya Covid-19 juga tentu memberikan berbagai komando yang sangat berpengaruh pada hal-hal yang dilakukan untuk sosialisasi mengenai covid-19. Maka dari itu, banyak arahan-arahan yang mengharuskan untuk melakukan sosialisasi covid-19 seperti penggunaan masker, sosialisasi cuci tangan, menggunakan disinfektan, menjaga jarak, dan lainnya yang berkaitan agar para wisatawan dapat berwisata dan juga bebas dari covid-19.

### **Dimensi Actions (Tindakan)**

Tindakan merupakan suatu hal yang jelas, terdapat kebijakan hukum serta kepemimpinan guna membujuk orang agar turut berkomitmen (Mulgan, 2009). Pada penelitian ini, terdapat beberapa hal dan juga upaya yang dapat disebut tindakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dengan pengembangan pariwisata, diantaranya ialah:

- a. Hal yang dilakukan seperti berbagai event-event diganti menjadi sosialisasi *covid-19*, menyediakan berbagai hal terkait pencegahan dan penanggulangan *covid-19*. Hal itu dilakukan berdasarkan dinamika yang terjadi pada sebelum pandemic *covid-19* dan pasca *covid-19*. Pada saat *covid-19* juga terdapat hal-hal yang dilakukan secara daring seperti melakukan meeting secara daring yang dapat menghemat anggaran rapat.
- b. Salah satu program turunan atau kebijakan dari Pemerintah Pusat ialah pencegahan *covid-19* pada saat ini. Sebelumnya juga terdapat kebijakan yang memang harus dilakukan menurut perpres ialah pengembangan desa wisata, pengembangan pariwisata, *creative center*.
- c. Terkadang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengambil kebijakan mandiri akan tetapi dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang ada.

### **Dimensi Learning (Pembelajaran)**

Pembelajaran merupakan suatu tindakan guna menganalisis tindakan yang mesti dijalankan atau tidak, setelah itu meninjau dan melakukan evaluasi kembali tujuan, analisis serta arah yang dipilih (Mulgan, 2009). Melalui penjelasan tersebut, yang dapat menjadi indikator pembelajaran pada pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan asli dengan pengembangan pariwisata diantaranya ialah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata salah satunya dengan pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan penataan destinasi pariwisata.
- b. Mengoptimalkan promosi pariwisata melalui media *online*.
- c. Mempermudah pergerakan wisatawan menuju ke Kabupaten Pangandaran dan destinasi pariwisata dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas seperti perbaikan akses menuju Pangandaran atau destinasi wisata yang ada di Pangandaran.

- d. Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan edukasi kepada masyarakat.
- e. Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan, Ketika harapan wisatawan terhadap destinasi dan pelayanan wisata yang diberikan sesuai, kemungkinan besar mereka akan berkunjung kembali serta akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain (promosi dari mulut ke mulut).
- f. Mengembangkan pengelolaan destinasi wisata musiman dengan menciptakan event-event yang bersifat viral dan massif yang dapat menarik wisatawan untuk datang pada musim sepi kunjungan dan menambah lama tinggal wisatawan pada musim libur.
- g. Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem respon cepat dalam pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan terutama isu-isu negatif atau hoaxes sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir.

## SIMPULAN

Pada analisis yang sudah dilakukan dengan strategi pemerintahan sebelumnya, pada pengembangan pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran dapat dinyatakan memiliki dampak yang lebih positif. Strategi pemerintahan pada penelitian di atas digunakan dengan 5 indikator yang dikemukakan oleh (Mulgan, 2009). Hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memahami situasi dan kondisi juga menjadi salah satu acuannya. Berikut analisis dari 5 indikator terkait:

### 1. Purpose (Tujuan)

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki tujuan yang dimana sesuai dengan aspirasi juga kebutuhan serta keinginan dari masyarakat. Tujuan yang dituju oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menggambarkan dan sesuai dengan kondisi yang akan dibutuhkan dari salah satunya sektor pariwisata. Hal tersebut juga disesuaikan dan ditinjau kembali mengingat pada masa itu terdapat pandemic covid-19 yang dimana mempengaruhi berbagai sektor salah satunya ialah pariwisata.

### 2. Environments (Lingkungan)

Pada lingkungan yang menjadi destinasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran terdapat 5 lokasi yang diantaranya menjadi fokus pengembangan pariwisata. Lokasi-lokasi tersebut juga memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun masih terhitung dengan pendapatan asli daerah yang rendah.

### 3. Directions (Arahan)

Arahan yang dilakukan dalam strataegi peemrintahan di Kabupaten Pangandaran juga dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dilihat dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran yang sudah berantisipasi untuk melawan pandemic covid-19 agar tidak mempengaruhi sektor pariwisata kedepannya. Berbagai kebijakan dirasa dapat disebut preventif karena pemerintah mulai membuat arahan-arahan yang visioner kedepannya mengenai pandemic yang dimana sektor pariwisata mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran.

### 4. Actions (Aksi)

Aksi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pangandaran juga dapat dikatakan menjadi salah satu hal yang baik. Adanya pandemi covid-19 memberikan dinamika yang baru dimana kegiatan yang memiliki kontak fisik harus dikurangi agar tidak menimbulkan penyebaran covid-19. Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya untuk melakukan sosialisasi dari covid-19 agar wisatawan dan turis dapat berkunjung dengan nyaman, juga berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### 5. Learning (Pembelajaran)

Hal yang dapat menjadi pembelajaran pada strategi pemerintah di pemerintah Kabupaten Pangandaran diantaranya ialah dikarenakan adanya dinamika yang terjadi mengharuskan pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membuat strategi yang sesuai dengan kondisi



yang ada. Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga dirasa visioner karena dapat memahami kondisi yang sedang dialami pada daerahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggarini, D. T. (2021). Upaya Pemulihan Industri Pariwisata. *Jurnal Pariwisata*, 22-31.
- Fajrianti, D., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, 2364-2377.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for The Common Good*. Oxford University Press.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pebriana, F., Mulyawan, R., & Sutrisno, B. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Tahun)*. Bandung: Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisnawati, N. K., Budiasih, N. G., & Ardiasa, I. K. (2020). Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid 19 . *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 39-57.
- Wahyuni, D. (2021). Upaya Pemulihan Pariwisata Yogyakarta . *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 121-137.